

# KARAKTER ORANG MADURA DAN FALSAFAH POLITIK LOKAL

Ainurrahman Hidayat

(Penulis, dosen STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan.  
Kontak person 081230185895, alamat, Perumahan Graha Indah Tlanakan Pamekasan)

## **Abstrac**

*This article attempts to explore the basic character of Madurese people that put the moral-ethic basics on every attitude, utterances, and behavior of Madurese local politic phenomena. The study results four basic characteristics of Madurese---ejhin, koko, gherra and saduhunah. Those become local wisdom of Madurese people. The four basic characters should have introduced and provided each Madurese local politic phenomena to reach a better politic life. Ejhin character carries a tolerant nature, friendship and dependent. Koko character introduces loyalty, consistency, trust and responsibility. Gherra character reflects carefulness, transparency, and fairness. Saduhunah describes honesty and innocent.*

## **Kata-kata kunci**

*ejhin, gherra, koko, saduhuna*

## **Pendahuluan**

Istilah "teori politik" memiliki beragam pengertian yang dapat digunakan untuk memaknai berbagai fenomena perilaku politik. Teori politik bisa berarti seperangkat hipotesa mengenai proses atau institusi pemerintahan. Teori politik juga bisa merujuk pada prinsip-prinsip dan norma-norma moral yang mengontrol perilaku politik. Hal tersebut menandai seperangkat ide yang terlembagakan yang diperlukan untuk menjelaskan realitas. Berdasar pada makna tersebut di atas tujuan teori politik pun beragam. Boleh jadi teori politik memerlukan pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga

dapat berupaya memberikan kepada pembuat kebijakan prinsip-prinsip yang membantu dalam menangani problem sosio-politis tertentu. Teori politik juga bisa berusaha memberikan seperangkat norma dalam memutuskan apa yang secara etis baik bagi kehidupan politik<sup>1</sup>

Sebagaimana dipahami sejak semula bahwa kajian mengenai teori politik merupakan upaya untuk memperoleh pengetahuan murni mengenai dasar-dasar politik. Dasar-dasar tersebut berkenaan dengan tatanan politik yang baik atau jujur secara moral. Penelaahan yang berkenaan dengan tatanan politik yang baik sesungguhnya

---

<sup>1</sup>Henry J.Schmandt, *A History of Political Philosophy*, Terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm., 4.

merupakan ruang lingkup kajian filsafat politik<sup>2</sup>. Salah satu ciri khas yang menandakan bahwa suatu kajian telah memasuki wilayah filsafat politik adalah jika dimulai dengan persoalan, "apa yang disebut dengan kebaikan umum atau masyarakat yang baik?". Ciri ini akan menguji premis-premis yang berkaitan dengan justifikasi moral atas kekuasaan politik dan garis demarkasi antara otoritas pemerintah dengan kebebasan manusia. Dalam arti lain, filsafat politik melacak cara-cara bagaimana kekuatan politik seharusnya digunakan dan dimana batas-batas moral semestinya diinjeksi pada kekuatan politik tersebut. Proses verifikasi terhadap persoalan etis tersebut hanya bisa dihadirkan melalui pengkajian tentang hakikat manusia<sup>3</sup> Ruang lingkup yang demikian akan penulis pergunakan sebagai *mainstream* dalam pengkajian filsafat politik lokal melalui perspektif karakter masyarakat Madura.

Asumsi yang mendasari *mainstream* di atas adalah semua fenomena perilaku politik akan selalu memiliki implikasi etis dan kalau berbicara tentang makna etis mustahil untuk tidak membahas hakikat manusia baik dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, dengan alam maupun antara manusia dengan dunia ghaib. Dalam perspektif filsafat politik yang dijadikan titik tolak pembahasan adalah hubungan manusia dengan sesamanya. Bahkan sesungguhnya hubungan antara teori politik dan filsafat politik itu bukan hubungan antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain, tetapi justru merupakan hubungan antara cara dan tujuan. Dengan kata lain

hubungan antara bagaimana cara mewujudkan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dengan sasaran yang dituju. Apakah cara yang dipilih tersebut akan memenuhi sasaran yang diinginkan, tentu hal itu dalam kerangka etis. Sebab sangat boleh jadi prosedur atau cara baik bersifat individual maupun institusional yang dipilih tidak menjamin bahwa kekuasaan politik akan digunakan demi kebaikan umum, justru seringkali akan digunakan demi kepentingan pribadi ataupun beberapa pihak saja.

Akan tetapi, tentu saja perbincangan yang mendalam tentang fenomena politik dalam kerangka etis tidak bisa berlangsung dalam ruang hampa. Penelitian di bidang filsafat politik sangat membutuhkan pengetahuan yang memadai tentang fenomena kehidupan politik. Sebab hal tersebut hanya bisa dijelaskan melalui kondisi-kondisi faktual dalam kondisi riil di lapangan. Sebuah teori filsafat politik tidak akan bermanfaat, atau setidaknya kemanfaatannya kurang teraktualisasi secara konkrit manakala hanya diderivasi begitu saja dari hakikat watak manusia tanpa mempedulikan secara sungguh-sungguh unsur partikularitasnya. Padahal sudah diketahui bahwa unsur partikuler hanya bisa dipahami dalam kerangka situasi dan kondisi waktu dan konteks fenomena kehidupan politik yang terus menerus berubah.

Namun demikian, karena filsafat politik selalu disandarkan pada idea-idea moral yang telah terwujud dalam institusi politik, maka sangat diperlukan suatu pemahaman komprehensif yang mengarah pada semacam sinkronisasi idea moral dan tujuan dalam lembaga sosial dan nilai-nilai yang direpresentasikan dengan suatu gambaran umum entitas politik. Diperlukan

---

<sup>2</sup>Ibid., hlm., 4-5.

<sup>3</sup>Ibid., hlm., 5.

pengkajian yang saling menjelaskan antara hakikat politik secara universal dalam karakteristik dasar suatu masyarakat dengan pemahaman konkrit tentang nilai-nilai yang diusung oleh masyarakat yang bersangkutan. Kedua hal tersebut harus dikaji secara beriringan sebagai dua hal yang akan memberikan penjelasan utuh mengenai fenomena kehidupan politik. Kerangka berpikir yang demikian merupakan wewenang filsafat politik untuk menganalisisnya.

Asumsi berikutnya dari penulis tentang keterkaitan antara filsafat politik dengan bidang etis adalah selalu terdapat kesesuaian antara ide manusia sebagai agen moral yang bebas dan eksistensi keberaturan dalam fenomena politik yang bisa menjadi konfigurasi realitas empiris. Sebagian besar persoalan mendasar yang dihadapi para penggagas dan pemerhati pemikiran politik selalu direlasikan pada persoalan etis.

Karakteristik dasar masyarakat Madura dalam pembahasan makalah ini akan penulis sandarkan pada karakteristik manusia Madura seperti yang telah dibahas oleh Mien Achmad Rifai dalam buku *Manusia Madura*. Berdasar pada karakteristik dasar manusia Madura tersebut kemudian akan dicoba untuk direfleksikan pada persoalan etis dalam kaitannya dengan politik lokal Madura.

### **Karakter Dasar Orang Madura**

Beberapa karakter dasar orang Madura adalah sebagai berikut. Pertama, *ejhin* (secara harfiah berarti sendiri-sendiri) merupakan pembawaan dasar orang Madura yang cenderung bersifat individualistis walaupun tidak egoistis. Pembawaan tersebut sangat menekankan pada rasa ketidaktergantungan (baca: kebebasan) dirinya pada orang lain.

Peribahasa Madura yang menggambarkan pembawaan *ejhin* adalah *satendhak sapeccak* (secara harfiah berarti selangkah sekaki). Peribahasa tersebut dimaksudkan untuk menyatakan kedekatan dan kejauhan nisbi ukuran ikatan kekeluargaan. Jarak antara diri seseorang dengan sepupu (*satendhak*) dan saudara kandung (*sapeccak*) hampir tidak ada bedanya. Keduanya sama-sama dekat sekaligus sama-sama jauh. Ketidakpedulian dan rasa ketaktergantungannya yang ekstrem pada anggota sanak keluarga adakalanya dinyatakan dengan peribahasa *ta' abau sendu' ta' abau centong* (secara harfiah berarti tidak berbau senduk tidak berbau centong) untuk menunjukkan takberartinya hubungan darah yang ada. Di samping itu juga ada peribahasa lain yang menunjukkan hal yang sama, yaitu *oreng dhaddhi taretan, taretan dhaddhi oreng* (secara harfiah orang lain jadi saudara, saudara jadi orang lain). Peribahasa tersebut menunjukkan bahwa sanak keluarga bisa juga menjadi "orang luar" sama sekali, apabila terhinggapi perasaan *aba' saaba'* (hanya dirinya sendiri) sehingga ia akan bersikap *odi' kadhibi'* (bersikap individualistis) yang berimplikasi pada sikap tidak perlu memikirkan orang lain. Orang seperti itu akan dikatakan *martabbat oreng elanyo' ba'a* (seperti orang terhanyut banjir), sebab ia akan mencari keselamatan dan alur hidupnya secara mandiri<sup>4</sup>

Pada prinsipnya pembawaan *ejhin* ini secara umum akan membentuk karakter orang Madura yang bisa bersikap toleran menghadapi lingkungannya sepanjang hal tersebut tidak mengganggu kepentingan dirinya,

---

<sup>4</sup>Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura, pembawaan, perilaku, etos kerja, penampilan dan pandangan hidupnya seperti dicitrakan peribahasanya* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm., 201-202.

baik langsung maupun tidak langsung. Karakter ini boleh jadi merupakan implikasi langsung dari keadaan geografis tanah Madura yang gersang, sehingga setiap orang Madura berpantang berpangku tangan untuk menyerah pada keadaan yang tidak bersahabat pada hidupnya. Setiap orang Madura dituntut untuk bekerja keras agar tetap *survive* tanpa banyak mengeluh dan menggantungkan hidupnya pada orang lain. Pada saat orang Madura berhasil mengatasi kesulitan hidupnya, tidak bisa dipungkiri secara psikologis orang Madura akan beranggapan bahwa itu adalah hasil usaha kerja kerasnya. Ketidak tergantungan pada orang lain dan sikap mandiri secara terus menerus untuk *survive* dalam waktu yang relatif lama dengan sendirinya akan membentuk karakter *ejhin* pada orang Madura.

Implikasi lain karakter *ejhin* tersebut adalah orang Madura memiliki potensi bersikap dan berpendirian bebas tanpa tergantung atau terpengaruh pada lingkungan sekitarnya. Sudah barang tentu suatu potensi akan menjadi aktus manakala memang ada kehendak bebas untuk mengembangkan potensi tersebut secara terus menerus, apalagi lingkungan hidupnya kemudian semakin menyuburkan potensi yang memang sudah ada di dalam dirinya. Di samping itu orang Madura juga berpotensi memiliki sikap yang teguh tak tergoyahkan pada pilihannya sendiri yang berakar dari sikap mandiri dan tidak tergantung dari orang lain. Sikap ini akan berubah dengan segera manakala ditemukan ada kecenderungan merugikan dirinya baik langsung maupun tidak langsung. Orang Madura akan bersikap toleran, bersahabat jika kepentingan dirinya tidak terusik, dan

akan terjadi sebaliknya manakala kepentingannya mulai diusik oleh seseorang atau sekelompok orang. Apabila hal ini yang terjadi maka orang Madura akan beringsut untuk mulai mengubah sikap teguhnya menjadi sikap-sikap yang lain demi keselamatan kepentingan dirinya.

Kedua, kaku dan kasar (*gherra*). Karakter orang Madura yang kedua ini seperti perumpamaan *akanta sa'ar gherrana* (seperti ijuk aren kekakuannya). Perumpamaan tersebut diduga muncul dari pengamatan orang-orang tua Madura tempo dulu saat lidahnya merasakan kekasaran potongan ijuk yang mengotori panganan yang terbuat dari tepung sagu aren yang halus dan lembut. Ibarat ini tepat sekali untuk diterapkan pada seseorang yang dalam bergaul tidak lentur sikapnya, tidak halus perilakunya dan tidak lemah lembut tutur katanya. Oleh karenanya ketika orang Madura berhasil meraih kesuksesan dengan kerja kerasnya dalam mengatasi tantangan alam secara tidak mudah, kemudian secara pelan-pelan akan dihindangi rasa ketakutan hilangnya kesuksesan tersebut. Perasaan tersebut membuat orang Madura selalu curiga dan tidak percaya pada orang lain, sehingga segala hal yang telah berhasil diraihinya secara gemilang akan dibelanya secara kaku, bahkan nyawapun dipertaruhkan. Perilaku seperti inilah yang kemudian oleh orang luar dinilai kaku dan kasar tetapi memang pembawaan kaku dan kasar tersebut sangat sulit dihilangkan, walaupun yang bersangkutan termasuk kaum terpelajar<sup>5</sup>

Pembawaan kaku dan kasar dalam diri orang Madura berpotensi memunculkan sikap dan perilaku apa

---

<sup>5</sup>Ibid., hlm., 204-205.

adanya yang betul-betul merupakan pengejawantahan isi hatinya. Orang Madura akan bersikap, berkata dan berperilaku sesuai dengan apa yang dirasakan dalam hatinya, walaupun terkadang terkesan kurang mempedulikan perasaan orang lain. Di situlah kemudian orang luar Madura melihat dan merasakan sikap dan perilaku yang kaku dan kasar. Sikap, perkataan dan perilaku apa adanya tersebut sekaligus memunculkan potensi yang lain, yaitu munculnya sikap kejujuran setidaknya dalam proses fenomena politik. Dengan kata lain ketika orang Madura terlibat dalam proses fenomena politik tertentu bisa dikatakan, bahwa orang Madura melakukannya dengan "hati" (*e kaateh*), sehingga setiap pilihan yang sudah ditentukan merupakan bagian dari karakternya.

Sikap, perkataan dan perilaku "apa adanya" juga berpotensi memunculkan sikap negatif berupa konflik pada arus bawah (*grass root*) terutama dalam proses fenomena politik lokal. Konflik tersebut bisa dimungkinkan terjadi karena adanya pembawaan orang Madura berupa sikap, perkataan dan perilaku kaku dan kasar, seperti yang telah dipaparkan di atas. Fenomena pembawaan kaku dan kasar tersebut masih ditambah lagi pembawaan yang lain, seperti *ejhin* dan pemberani (*bangal addhu ada'*) jika dirinya berada dalam posisi yang benar.

Ketiga, kukuh (*koko*). Keteguhan orang Madura dalam memegang keyakinan, pendirian, kecondongan hati, pendapat dan juga perkataannya tidak pernah terlepas dari pengamatan orang luar. Pembawaan selalu *koko* (kukuh, teguh) dalam bersikap ini selalu muncul (terutama) dalam keadaan suasana lingkungan yang serba tertib, saat hukum

dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku tertegakkan secara mapan. Pembawaan ini selalu muncul juga ketika pemenuhan janji terlaksanakan oleh situasi pranata yang kondusif. Sejalan dengan itu, orang Madura sangat menghormati dan menyenangkan orang yang *koko oca'na* (teguh kata-katanya) karena akan *ekenneng talee cacana* (dapat diikat perkataannya, dengan kata lain dapat dipercaya kata-katanya). Oleh karena itu orang tidak perlu lagi *acaca dukale* (berkata dua kali) sebab kesimpulan pembicaraannya tidak akan berubah. Perkataan itu hendaklah bukan sesuatu yang diucapkan oleh seseorang yang *acaca duwa'* ("bercabang lidahnya"), tetapi merupakan kata-kata seorang ksatria, agar dapat dipercaya sepenuhnya. Ini kaitannya dengan sifat seseorang yang harus bisa *etegghu' jhanjhina* (dapat dipegang janjinya)<sup>6</sup>

Pembawaan kukuh yang disandang orang Madura tersebut dalam perspektif yang lebih luas berpotensi mengantarkan orang Madura untuk selalu loyal pada pekerjaan, setia pada atasan atau juga patuh pada sistem dan pranata yang ada. Potensi seperti ini sungguh-sungguh dahsyat jika diarahkan pada sesuatu yang bernilai positif, tetapi bukan hanya itu juga berpotensi dimanfaatkan secara salah oleh segelintir orang dalam suatu proses fenomena politik tertentu. Kepatuhan-orang Madura, seperti *pako ngenneng ka kaju* (paku menancap di sebatang kayu), jika dianalisa dalam konteks proses politik lokal bisa melahirkan "barisan" orang Madura yang konsisten pada pendirian awal dalam meyakini kelompoknya masing-masing. Akan tetapi, ada satu hal

---

<sup>6</sup>ibid., hlm., 208-209.

yang tidak boleh dilupakan, yaitu pimpinan kelompok yang mampu menyihir dan mengomando anggota kelompoknya. Dalam masyarakat Madura pimpinan kelompok biasanya dipegang oleh para kyai, para kepala desa (*klebun*) dan para *blater* (pimpinan kelompok di dunia hitam).

Orang Madura yang berada dalam posisi sebagai anggota dalam suatu kelompok tertentu akan memberikan sikap loyal yang luar biasa pada kelompoknya masing-masing manakala ada "jaminan" baik bersifat ekonomis, psikologis maupun "religius" dari para pimpinannya. Jaminan ekonomis mengarah pada proses terciptanya suasana kehidupan yang beraroma kemakmuran, sedangkan jaminan psikologis lebih mengarah pada ikatan "kekeluargaan" dalam satu kelompok dengan visi dan misi yang sama, senasib dan seperjuangan. Pada aspek "religius" sebenarnya memiliki pengertian adanya spirit yang sama untuk memperjuangkan, memajukan dan mengembangkan kelompoknya demi keuntungan bersama. Hal-hal seperti itulah yang mampu melahirkan sikap, perkataan dan perilaku orang Madura untuk selalu loyal pada pekerjaan, keyakinan dan atasannya.

Keempat, *saduhuna* (apa adanya). Lingkungan sekitar, sumber daya alam, produk seni budaya, kosakata bahasa, harta benda, dan segala sesuatu yang mengelilingi keseharian orang Madura dapat dikatakan serba kekurangan dan miskin variasi. Keadaan ini tercermin pula pada pembawaan orang Madura yang dinyatakan dengan ungkapan *saduhuna* (apa adanya), yang ternyata melandasi sifat tegar dan tegas manusia Madura. Pembawaan yang sering mengesankan keluguan ini akan membuat orang Madura jujur dan polos

dalam menyatakan perasaan hati serta segala sesuatu yang terdapat di benaknya. Dengan pembawaan *saduhuna* inilah orang Madura tidak takut *addhu terrang* (bersikap jujur), dan selalu berkata seadanya untuk menyampaikan segala sesuatu tanpa peduli siapa pun yang berada di hadapannya. Orang Madura juga sangat yakin bahwa *oreng jhujhur mate ngonjhur* (orang jujur mati di tempat tidur) dengan sempurna. Orang yang jujur amat dipercaya paling mujur dan sangat berbahagia hidupnya<sup>7</sup>

Pembawaan *saduhuna* ini berpotensi menciptakan situasi lingkungan dimana orang Madura hidup dengan kejujuran dalam bersikap, berkata-kata dan berperilaku. Potensi *saduhuna* ini menyebabkan orang Madura dalam hal sikap, perkataan, dan perilakunya tidak berbasa-basi dalam merespons setiap fenomena kehidupan yang tidak disenangi atau sesuatu yang diyakini. Pembawaan seperti itu sungguh-sungguh menarik ketika dilekatkan pada suatu fenomena politik lokal yang selalu dibumbui dengan aroma kamouflase (*camouflage*) berbagai kepentingan sesaat. Sikap, perkataan dan perilaku apa adanya yang sudah melekat dalam diri orang Madura dalam konteks perilaku fenomena politik lokal akan mengarah pada terciptanya proses fenomena politik lokal yang sesuai dengan hati nuraninya.

Pembawaan *saduhuna* tersebut juga akan mengarah pada perilaku politik lokal yang bersifat mandiri tanpa adanya unsur paksaan atau setidaknya meminimalisir adanya pengaruh ekstern yang begitu kuat demi kepentingan sesaat. Ketika pengaruh ekstern secara kodrati memang harus ada, tetapi

---

<sup>7</sup>ibid., hlm., 209-210.

setidaknya hanya berfungsi sebagai "bahan pertimbangan" dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan hati nuraninya. Dalam babak terakhir setiap sikap, perkataan dan perilaku politik lokal akan selalu dibarengi dengan sebuah keyakinan kuat yang berasal dari pembawaan *saduhuna*. Hal itu berarti orang Madura akan selalu berada dalam posisi yang tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ekstern di luar keyakinannya, yang sejak awal memang telah dipercaya sebagai sesuatu yang benar.

### **Teori Politik yang Etis**

Esensi perbincangan ilmu politik dalam teori politik adalah tentang kekuasaan. Telah dipaparkan di atas bahwa aspek etis dalam politik tidak hanya berfokus pada masalah legitimasi kekuasaan, tetapi juga menyangkut perilaku atau tindakan politik dari seluruh partisipan kehidupan politik (rakyat). Pertanyaan besar yang perlu diajukan adalah bagaimanakah perilaku politik yang etis itu? Jawabannya sangat bergantung pada budaya, filsafat dan sistem politik yang manakah yang menjadi dasar dari seseorang menjawab pertanyaan tersebut. Basis filsafat, paham dan teori politik yang dipilih sangat menentukan bagaimana persepsi etis dari suatu tindakan politik tertentu. Pada akhirnya akan terjerembab pada persoalan relativisme etis, yaitu norma-norma moral yang berlaku dalam pelbagai kebudayaan dan masyarakat tidak sama atau berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut bisa terjadi karena perbedaan titik berangkat atau dasar berpikir dari teori politik dan teori

etika yang dipercayai seseorang dalam menjawab pertanyaan tersebut<sup>8</sup>

Walaupun begitu masih ada satu prinsip etika dasar yang dapat dijadikan pegangan umum dalam menyikapi fenomena politik, yaitu prinsip yang berkenaan dengan kesadaran bertanggung jawab sebagai manusia dalam kehidupan bersama dalam berbagai dimensinya. Sikap atau perilaku dalam semua dimensi tersebut tidak boleh hanya ditentukan oleh pertimbangan untung rugi diri sendiri, oleh keperluan masyarakat terhadap pembangunan, oleh kebanggaan nasional, oleh keinginan untuk memenangkan kelompok sendiri, oleh dogma-dogma ideologis, melainkan harus ditentukan sesuai dengan martabat dan tanggung jawab manusia sebagai manusia. Secara luas dan konklusif, perilaku yang etis adalah perilaku yang tidak menabrak martabat dan tanggung jawabnya sebagai manusia yang baik, tentu pula dengan memperhatikan aspek utilitarianisme, soal kebenaran dan keadilan<sup>9</sup>

Dalam sejarah politik kekuasaan terdapat dua paradigma yang saling berhadapan secara diametrikal, yaitu paradigma otoritarian dan paradigma demokratis. Paradigma demokratis diasumsikan memiliki keabsahan etis yang tak terbantah. Demokrasi diklaim sebagai salah satu prinsip dari etika politik modern yang utama, di samping konsep tentang HAM, keadilan distributif, *good governance*, masyarakat madani dan lain-lain. Dalam hal ini demokrasi diasumsikan kuat memiliki legitimasi etis dan saat ini dipandang

---

<sup>8</sup>Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm., 26

<sup>9</sup>Burhanuddin Salam, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm., 9.

sebagai etika politik modern, yang menjadi ukuran dalam setiap tindak politik atau tata krama berpolitik yang terpuji dan "sehat". Paradigma otoritarian (ideologis) telah ditolak karena tidak memiliki legitimasi etis, karena sifatnya yang represif (biasanya mengandalkan kekuatan intelijen dan militer), diskriminatif dan menjatuhkan martabat kemanusiaan secara luas. Dalam paradigma ini politik semata-mata diabdikan untuk kepentingan berkuasa dengan cara apapun tanpa mempertimbangkan aspek moral (*code of moral*)<sup>10</sup>

Sebagian besar pendapat menyatakan bahwa politik dapat terlepas (dipisahkan) dari moral. Politik seringkali dianggap tidak memerlukan moral (etika). Pendapat ini bersandar pada pikiran Machiavelli yang memahami struktur dasar dan hakikat kekuasaan yang berbeda dengan kebanyakan penganjur etika dalam penyelenggaraan kekuasaan. Pendapat Paul Ricoeur misalnya, dalam hubungan antara etika dan politik, akan terlihat betapa politik mendapatkan martabat yang dimilikinya. Jika politik ingin menjadi otonom terhadap dimensi ekonomi dan tehnik, harus ditemukan dalam makna tindakan rasional yang tidak dapat dipisahkan dari moral atau maksud etika<sup>11</sup>

Bagaimanapun kehidupan politik itu sendirilah yang memberi ruang munculnya pahlawan dan pemimpin besar. Politik boleh dikatakan selalu melibatkan upaya keras, dan upaya keras memerlukan orang yang gigih dan ambisius. Namun demikian, Kant tidak sependapat dengan pandangan dramatis tentang politik tersebut. Dia justru

mengakui bahwa politisi bertindak berdasarkan segala jenis motif selain motif moral, namun menurutnya ini bukanlah alasan untuk meninggalkan semua pemikiran tentang tindakan berprinsip dalam dunia politik. Jika kita menganut pandangan yang lebih empiris tentang politik, yang berkenaan dengan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama individu, kita sekilas mengetahui bahwa moralitas mestinya memainkan peranan. Politisi berurusan dengan persoalan yang sangat penting bagi manusia karena mereka dibebani tanggung jawab atas kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu mereka semestinya, minimal, memiliki konsepsi tentang kesejahteraan umat manusia, dan konsepsi itu tidak lain adalah konsepsi moral atau etika<sup>12</sup>

Oleh karena itu kemudian Kant membuat perbedaan penting dalam membahas peranan teori moral dalam politik. Perbedaan tersebut adalah antara politisi moral dan moralis politik. Politisi moral adalah orang yang memahami prinsip-prinsip kearifan politik sedemikian rupa sehingga ia bisa hidup dengan moralitas. Sedangkan moralis politik adalah orang yang mereka-reka moralitas supaya cocok dengan kepentingan kalangan negarawan. Jadi dalam pandangan Kant, moral dan dunia politik berkaitan sangat erat. Dunia moral memberi konsepsi tentang masyarakat ideal dimana individu memperlakukan sesamanya sebagai tujuan itu sendiri. Dunia politik menyediakan arena penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Berkat kemauan yang baik dari politisi moral

---

<sup>10</sup>Ibid., *Filsafat Demokrasi*, hlm., 20-21.

<sup>11</sup>Ibid., hlm., 25.

<sup>12</sup>Howard Williams, *Filsafat Politik Kant*, terj., (Jakarta: JP-Press bekerjasama dengan DPP IMM, 2003), hlm., 52-53.



cita-cita tersebut dapat memainkan peranan yang tepat dalam politik<sup>13</sup>

### Filsafat Politik Lokal

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pengertian teori politik dalam artikel ini tidak hanya terfokus pada masalah legitimasi, melainkan juga soal tingkah laku politik seseorang atau masyarakat. Persoalan tingkah laku politik tersebut jika dikaitkan dengan sistem politik yang dipilih, akan melahirkan sikap berupa moralitas politik sebagai konsekuensi logis dari suatu ide (gagasan). Asumsi dasarnya adalah terdapat hubungan yang deterministik antara nilai yang dianut dengan tingkah laku seseorang atau masyarakat tertentu. Nilai norma merupakan patokan atau pedoman ketika seseorang atau masyarakat bertingkah laku. Nilai-nilai itu memberikan batasan tentang apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah, atau apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, tingkah laku merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang dianut. Dengan kata lain, tingkah laku merupakan cerminan dari apa yang ada dalam alam pikiran (kesadaran) seseorang<sup>14</sup>

Pembawaan *ejhin*, *gherra*, *koko* dan *saduhuna* merupakan bagian dari karakter orang Madura yang sebenarnya juga berdimensi etis dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara luas, termasuk di dalamnya dalam konteks perilaku politik lokal. *Ejhin* dalam dimensi etis akan memberikan makna bahwa sikap toleran, bersahabat dan bersikap mandiri perlu dikembangkan dalam berbagai dimensi kehidupan. Sikap toleran, bersahabat dan mandiri akan menjadikan orang Madura

mengembangkan tradisi proses fenomena politik lokal yang santun. Pada level masyarakat bawah partisipasi dengan model *ejhin* akan menciptakan pola rekrutmen pemimpin yang benar-benar alami, karena didasari oleh proses fenomena politik lokal yang toleran, bukan pemaksaan dengan menghalalkan segala macam cara. Didasari oleh proses fenomena politik lokal yang bersahabat, bukan saling bermusuhan dengan aroma persaingan yang tidak sehat. Didasari proses fenomena politik lokal yang mandiri, bukan sikap yang bersifat taklid buta tanpa unsur rasionalitas yang jelas.

Sedangkan partisipasi politik pada level elit dengan arahan karakter model *ejhin* akan menghasilkan pola berdemokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan hati nurani untuk mengedepankan pola-pola politik lokal yang beradab, yaitu toleran, bersahabat dan mandiri. Model politik lokal dengan aroma *ejhin* dalam arti tertentu merupakan muatan politik lokal khas masyarakat Madura yang tercipta karena karakter orang Madura yang bersifat individualistis tapi tidak egois. Bersifat individualistis karena orang Madura selalu ingin berkehidupan secara mandiri tanpa banyak tergantung pada orang lain dalam menata kehidupannya yang seringkali tidak mudah. Bersifat tidak egois karena orang Madura berasumsi bahwa kehidupan akan berjalan normal manakala kehidupan pribadinya tidak diusik, sedemikian rupa sehingga tidak mengancam keberlangsungannya. Pada babak terakhir pembawaan *ejhin* akan memunculkan model kehidupan yang terpola dalam konfigurasi yang bersifat toleran, bersahabat dan mandiri.

Tentu saja model hidup bermasyarakat, terutama dalam konteks politik lokal secara toleran, bersahabat

---

<sup>13</sup>Ibid., hlm., 58-59.

<sup>14</sup>Ibid., hlm., 112.

dan mandiri perlu rumusan yang aplikatif dalam menterjemahkannya. Akan tetapi, secara etis model *ejhin* akan menciptakan suasana kehidupan politik lokal menjadi bergairah tanpa harus kehilangan muatan kearifan lokal, yang seharusnya terus menerus ditumbuh kembangkan. Jika model *ejhin* dikembangkan secara beriringan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menghasilkan rumusan fenomena politik lokal yang khas Madura.

Pembawaan *gherra* (kaku dan kasar) juga merupakan bagian dari karakter orang Madura yang berdimensi etis pula dalam konteks fenomena politik lokal. Dimensi etis yang dimaksud adalah adanya sikap kehati-hatian dalam mengambil sikap, perkataan dan perilaku keseharian agar tidak menyinggung, atau merusak tatanan kehidupan orang lain yang sudah mapan. Kehati-hatian tersebut perlu selalu diambil dalam bersikap, berkata-kata dan berperilaku karena kesalahan dengan merusak tatanan kehidupan orang lain akan berhadapan dengan pembawaan *gherra* orang Madura. Dalam konteks fenomena politik lokal sikap kehati-hatian yang berkaitan dengan proses politik lokal (tatanan kehidupan orang lain) harus selalu dijaga, sebab bukan hanya berhubungan dengan orang perseorangan, tetapi juga berkaitan dengan kelompok tertentu. Jika hal itu yang terjadi maka sudah bisa dipastikan konflik arus bawah sebagai akibatnya. Babak berikutnya proses demokrasi dalam alur politik lokal akan terganggu, sehingga proses pencapaian politik lokal yang berdimensi etis pun tidak akan tercapai secara optimal.

Pembawaan *gherra* sebenarnya, menurut penulis lebih dekat kepada

makna tegas dalam bersikap, berkata-kata dan berperilaku. Sikap *gherra* (tegas) tersebut memiliki makna etis yang sangat penting untuk dielaborasi ke dalam fenomena politik lokal. Pembawaan *gherra* ketika diterapkan dalam fenomena politik lokal akan memberikan nuansa kehati-hatian, karena akan berakibat pada situasi yang tidak diharapkan di saat sikap tegas kurang diperhatikan dalam pengambilan keputusan pada proses politik lokal. Pembawaan tegas di sini berkenaan dengan sikap, perkataan dan perilaku fenomena politik lokal mulai dari proses kaderisasi, pembinaan dan pemilihan secara transparan tanpa melibatkan unsur ikatan apapun, kecuali ikatan ideologis kelompok masing-masing. Sikap ketidak transparanan dalam proses kehidupan keseharian saja sudah menimbulkan situasi *chaos*, apalagi dalam konteks fenomena politik lokal yang lebih membutuhkan sikap kehati-hatian dan tegas lebih ekstra dari biasanya.

Pembawaan *gherra* seperti menemukan tempat yang tepat dalam situasi dan kondisi yang tepat pula, karena dalam setiap proses politik selalu membutuhkan persemaian sikap transparansi dan keadilan. Ketika sikap transparansi dan keadilan diabaikan, maka orang Madura akan menunjukkan "taringnya" berupa pembawaan *gherra* (tegas). Pembawaan *gherra* sesungguhnya dalam perilaku keseharian muncul guna merespons fenomena kehidupan yang dianggap menyimpang dalam logika kehidupan orang Madura. Penulis berasumsi bahwa setiap masyarakat di manapun berada selalu memiliki logika kehidupan yang khas sebagai bagian dari pembacaan terhadap setiap fenomena kehidupan yang bersifat tri-prakara, yaitu hubungan antar sesama, hubungan

manusia dengan alam dan manusia dengan dunia ghaib. Dalam istilah yang sedang ngetrend disebut dengan istilah kearifan lokal (*local wisdom*). Fenomena politik lokal sebagai bagian dari kehidupan masyarakat adat merupakan salah bagian saja dari kearifan lokal masyarakat tersebut.

Perilaku yang dianggap disharmonis (menyimpang) dari kearifan lokal yang telah dimiliki sejak dahulu akan selalu disikapi dengan karakter khas orang Madura, yaitu *gherra* tadi. Perlakuan yang sama juga akan dikenakan pada setiap fenomena politik lokal yang dianggap bagian dari fenomena kehidupan disharmonis. Tidak ada jalan lain untuk menghadapi pembawaan *gherra* orang Madura tersebut kecuali dengan sikap hati-hati, transparan dan adil, sehingga konflik dahsyat karena sifat *gherra* tadi bisa diminimalisir sejak dini. Dalam arti tertentu sikap, perkataan dan perilaku *gherra* sesungguhnya bisa menyeimbangkan setiap fenomena politik lokal yang bersifat disharmonis, yaitu bersifat tidak transparan dan tidak adil. Semestinya pembawaan sikap *gherra* ini menjadikan fenomena politik lokal di wilayah Madura bisa lebih kondusif karena orang Madura akan selalu bersikap, berkata-kata dan berperilaku lebih hati-hati.

Pembawaan *koko* (kukuh) yang sudah bersemayam dalam setiap diri orang Madura sejak dahulu kala telah membentuk karakter khas orang Madura berupa sikap loyal. Sikap patuh-taat baik terhadap pekerjaan yang sedang dijalani, terhadap atasan maupun terhadap "kelompok kepentingan" yang sedang diyakini sebagai benar. Dalam perspektif fenomena politik lokal pembawaan *koko* merupakan bagian tak terpisahkan dari

diperlukannya dimensi etis dalam fenomena politik lokal. Secara sekilas sepertinya tidak ada korelasi positif antara pembawaan *koko* dengan dimensi etis-praktis, padahal kalau ditelaah secara cermat pada hakikatnya sifat *koko* tersebut sarat dengan nuansa etis. Penulis berasumsi demikian karena pembawaan *koko* lebih dekat kepada makna etis "amanah".

Istilah amanah tersebut muncul karena ketika orang Madura bersikap, berkata-kata dan berperilaku yang tidak sesuai dengan jiwa "*koko oca'na* (teguh kata-katanya)" akan disebut sebagai orang yang kurang bisa dipercaya. Sebaliknya orang yang mampu bersikap, berkata-kata dan berperilaku konsisten dalam hidup kesehariannya akan diberi sebutan sebagai orang yang *ekenneng talee cacana* (dapat diikat perkataannya, dengan kata lain dapat dipercaya kata-katanya). Hal-ikhwal amanah jika diperluas ke wilayah politik lokal akan menjadi semacam rambu-rambu perpolitikan berdasar pada kearifan lokalnya. Ketika setiap orang Madura betul-betul memegang teguh prinsip karakter *koko*, konsekuensinya akan bermuara pada adanya sikap yang bertanggung jawab terhadap setiap pilihan hidupnya. Tak terkecuali juga terkena kepada fenomena politik lokal-Madura yang juga memerlukan sikap, perkataan dan perilaku amanah. Setiap sifat amanah akan selalu teriring dengan sikap, perkataan dan perilaku yang bertanggung jawab. Dua sifat tersebut bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang yang sama. Setiap aktivitas fenomena politik lokal-Madura yang dilakukan oleh orang Madura apapun bentuknya membutuhkan sifat amanah sebagai pengawal kesuksesannya. Sifat amanah berupa *koko oca'na* dan *ekenneng*

*talee cacana* akan menjadi bermakna manakala diikuti dengan sikap tanggung jawab.

Seseorang yang seringkali tidak konsisten, tidak amanah dan tidak bertanggung jawab dalam perspektif karakter dasar orang Madura, yaitu *koko* akan merusak tatanan demokrasi. Fenomena politik lokal sebagai bagian dari *grand desain* politik nasional, dan sekaligus sebagai pembentuk karakter politik nasional memiliki peran yang sangat strategis. Salah satu peran yang diharapkan dari politik lokal adalah terintegrasinya dimensi etis lokal (kearifan lokal) ke dalam setiap fenomena politik lokal. Pembawaan *koko* orang Madura sudah barang tentu akan memberikan andil yang tidak sedikit dalam pola manifestasi dimensi etis politik lokal. Ketika masyarakat Madura menghendaki adanya pola implementasi konsisten, amanah dan tanggung jawab pada setiap perpolitikan lokal, maka dengan sendirinya hal tersebut merupakan kontribusi nyata pembawaan *koko*, sebagai kearifan lokal Madura bagi politik nasional.

Pembawaan *saduhuna* sebagai karakter dasar orang Madura pun tidak kalah menariknya untuk ditelaah dalam memberikan kontribusi khususnya bagi politik lokal, dan politik nasional pada umumnya. Karakter *saduhuna* telah memberikan proses alih pengetahuan kepada generasi berikutnya dalam konteks dimensi etis berupa sikap, perkataan dan perilaku apa adanya. Dalam tataran pentas politik lokal sikap, perkataan dan perilaku apa adanya akan menuntun orang Madura ke arah pola perilaku jujur, tanpa basa-basi sesuai dengan keyakinan hati nuraninya. Kejujuran sudah pasti akan menjadi *ikon* dalam mengawal setiap proses fenomena

politik lokal apapun, apalagi bagi orang Madura ketidak jujuran akan selalu direspons dengan pembawaan *gherra*. Ketidak jujuran dalam proses politik lokal yang suasananya memang cenderung memanas, tidak saja akan berujung pada konflik intern-kekeluargaan, tetapi juga akan berujung pada konflik yang meluas dengan durasi waktu yang sangat lama.

Pembawaan *saduhuna* juga berimplikasi pada transfer pengetahuan generasi berikutnya berupa pengetahuan etis dalam bentuk sikap, perkataan dan perilaku yang dilandasi oleh sifat mandiri. Sikap, perkataan dan perilaku yang mandiri dalam konteks fenomena politik lokal secara etis mengarahkan masyarakat Madura untuk selalu mempercayai pilihan hati nuraninya. Intervensi ekstern boleh jadi hanya sebagai salah satu bahan pertimbangan, tetapi bukan sebagai faktor penentu tunggal. Hal tersebut mengajarkan masyarakat Madura untuk tidak dengan mudah tergiur bujuk rayu yang sifatnya fisik dan sesaat. Dalam arti tertentu pembawaan *saduhuna* tersebut cenderung dapat mengatasi fenomena *money politik*, kampanye kualitas diri secara kamufase, dan semua aktivitas politik lokal yang bersifat kepura-puraan. Sikap, perkataan dan perilaku kamufase sesungguhnya secara etis tidak akan pernah dibenarkan, karena kualitas diri yang sesungguhnya tidak pernah ditampakkan. Tuntunan akad jual beli saja diharuskan untuk membuka barang jualan secara transparan, tanpa menutup-nutupi cela barang jualannya tersebut.

Pembawaan *saduhuna* yang memberikan nuansa etis berupa sikap, perkataan dan perilaku apa adanya dan mandiri, telah memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi penggunaan hati nurani secara maksimal. Dengan kata

lain, telah memberikan kesempatan bagi orang Madura untuk meyakini pilihan politiknya berdasar pada semua pertimbangan yang mampu diaksesnya, tanpa memberikan ruang bagi tumbuh suburnya sikap membabi buta. Setiap orang Madura memiliki ruang untuk mengaktualisasikan seluruh potensi dirinya dalam pentas politik lokal tanpa diintimidasi, diintervensi apalagi didikte sedemikian rupa, sehingga aktivitasnya di dalam politik lokal tidak bersifat mandiri, dan sama sekali jauh dari pilihan hati nuraninya. Pembawaan *saduhuna* tersebut jika dicermati ulang mengindikasikan bahwa orang Madura telah meletakkan dasar-dasar kearifan lokal bagi terciptanya suasana kehidupan politik lokal secara etis.

### Penutup

Persoalan klasik yang selalu muncul dari setiap mutiara hikmah kearifan lokal masyarakat adalah persoalan transfer nilai, aktualisasi nilai, metode transfer nilai. Setidaknya tiga persoalan tersebut yang selalu menyertai kembang kempisnya kearifan lokal dalam tataran praktis, termasuk di dalamnya fenomena politik lokal. Persoalan transfer nilai dari generasi tua kepada generasi muda selalu menyisakan ruang kesalah pahaman. Generasi tua memandang nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal masyarakat penting dilestarikan sampai kapanpun. Sedangkan generasi muda melihat nilai-nilai kearifan lokal sebagai nilai yang telah *out of date*, sehingga harus digantikan oleh nilai baru yang lebih *up to date*. Persoalan pertama tersebut bisa dipahami konfliknya dalam kerangka adanya perbedaan kandungan pengetahuan yang dimiliki oleh kedua generasi yang berbeda jaman dan perspektif.

Persoalan pertama di atas akan berimplikasi pada proses aktualisasinya pada tataran praktis yang selalu tidak mudah untuk diselesaikan. Generasi tua memiliki prinsip bahwa apapun fenomena kehidupan yang dihadapi semestinya selalu dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal, yang telah turun temurun bersemayam dalam setiap sikap, perkataan dan perilaku masyarakat adat. Hal itu berarti tatanan kehidupan akan berjalan harmonis manakala didasari oleh kearifan lokal yang telah dimiliki. Sementara generasi muda merasakan adanya *gap* yang dalam antara tataran teoritis kearifan lokal, dengan tataran praktis yang selalu mengalami perubahan seiring perkembangan jaman yang dinamis. Hal itu berarti berkaitan dengan apakah era kekinian harus beradaptasi dengan nilai kearifan lokal, ataukah nilai kearifan lokal harus merevisi dirinya agar sesuai dengan tuntutan kekinian.

Persoalan pertama dan kedua di atas akan terselesaikan jika kedua generasi tersebut secara arif menggunakan metode transfer nilai kearifan lokal dengan tanpa menghilangkan makna kearifan lokal, dan juga tanpa menghilangkan proses adaptasinya dengan era kekinian. Memang harus diakui tidaklah mudah menemukan formulasi yang jitu yang memasukkan kedua unsur yang sama-sama penting, yaitu unsur maknawi dan unsur kekiniannya. Akan tetapi, bukan suatu yang mustahil untuk diselesaikan jika ada kemauan bersama dalam membangun tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kedua generasi.

Begitu pula halnya dengan tatanan kehidupan politik lokal akan selalu dibayang-bayangi persoalan-persoalan seperti yang telah dipaparkan di atas. Fenomena politik lokal dengan segala

gerak dinamisnya akan selalu berhadapan dengan fenomena nilai-nilai kearifan lokal. Kedua fenomena kehidupan tersebut walau sebenarnya merupakan satu kesatuan, tetapi keduanya juga memiliki logikanya tersendiri yang terkadang sulit dipertemukan. Yang satu bercorak khas pemenuhan hasrat kekuasaan sedang yang lain bercorak khas etis-moral. Fenomena politik termasuk politik lokal semestinya di dalamnya juga memuat dimensi etis, karena tujuan terakhir setiap proses perebutan kekuasaan berdimensi kesejahteraan. Sedangkan fenomena kearifan lokal merupakan bagian dari cara pandang masyarakat adat tentang dunia secara holistik yang berdimensi etis-moral. Kedua bidang kehidupan tersebut yang semula memang bertali kelindan sebagai satu kesatuan sekarang telah terpisah, dan penyatuannya kembali membutuhkan tidak saja kemauan yang kuat. Akan tetapi, juga kerja keras yang Maka, interpretasi politik tidak lantas

semata-mata bersifat politis. Interpretasi tanpa lelah demi mewujudkan kehidupan demokrasi politik lokal yang bermoral. politik lebih sebagai salah satu cara khusus diantara sekian banyak cara untuk memahami politik.

Idealitas moral dan ketakutan seseorang akan merembes ke dalam teori yang dibuatnya melalui spesifikasi dimensi antropologisnya. Teori menyampaikan rekomendasi yang tidak selalu ditentukan oleh bukti-bukti yang tersedia, untuk mengkristalkan pemahaman diri melalui cara tertentu dalam asa, kesia-siaan sebagaimana biasanya, sehingga artikulasinya akan membantu dalam mensolidkan realitas yang digambarkan, atau mencegah hasil yang tidak diinginkan, atau mempromosikan prestasi yang tengah dikejar. Inilah salah satu segi dari interpretasi yang dikemukakan dalam artikel ini, sekaligus bagian dari segi yang menentanginya<sup>15</sup> *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb*□



---

<sup>15</sup>William E. Connolly, "Penampakan dan Realitas dalam Politik" dalam Michael T. Gibbons (ed.), *Tafsir Politik, Interpretasi Hermeneutis Wacana Sosial-Politik Kontemporer*, terj. (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002), hlm., 236.



